

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

(Studi di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka)

Putri Astari

putriastari@gmail.com

STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat pada tahun 2018. Teori yang digunakan adalah Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Ramlan Surbakti dan Khoirudin dengan indikator status sosial dan pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa penghasilan dan pekerjaan mempengaruhi partisipasi perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam memilih pada Pemilihan Bupati tahun 2018. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Bangka pada Pemilihan Bupati tahun 2018.

Kata kunci: partisipasi perempuan, pemilihan bupati

ABSTRACT

This research discusses the factors that influence women's participation in regional head elections in Sri Menanti Village, Sungailiat District, in 2018. The theory used is the socio-economic background factors of Ramlan Surbakti and Khoirudin with indicators of social status and education. The type of research is descriptive with a qualitative approach. This research used interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that income and work affect women's participation to vote in the Sri Menanti Village, Sungailiat District, in the 2018 Regent Election. Education is one of the factors that determine the level of female voter participation in Sri Menanti Village, Sungailiat Bangka District, in the 2018 Regent Election.

Keywords: women's participation, regent election

PENDAHULUAN

Partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik sebuah negara—baik sebagai pemilih, calon, pejabat terpilih, maupun penyelenggara pemilu—sangatlah penting. Kesetaraan gender dalam bidang politik diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi perwakilan—khususnya di lembaga parlemen—dengan menciptakan keseimbangan komposisi perwakilan antara laki-laki dan perempuan. Apabila mandat diberikan kepada kaum laki-laki saja, maka hal itu tidak akan mewakili seluruh rakyat yang pada dasarnya terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan. Masing-masing di antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kebutuhan yang tidak selalu sama sehingga—seperti dalam permasalahan perempuan—perempuanlah yang dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahannya. Sangatlah kecil peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan (Daulay, 2007: 35).

Secara etimologis, partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung ataupun tidak langsung turut mempengaruhi kebijakan negara. Artinya, partisipasi politik sangatlah wajib diketahui sebagai warga negara untuk mengetahui arah dan tujuan kemajuan bangsa (Suparno, dkk, 2005: 17).

Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun, kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Partisipasi politik juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisasi oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum.

Partisipasi politik—khususnya pada penelitian ini berupa partisipasi politik perempuan—semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender pada berbagai kebijakan publik dan untuk mencapai tujuan instrumen hukum yang sensitif, yang selama ini masih terabaikan dan menyebabkan ketimpangan di berbagai sektor kehidupan perempuan. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum harus ditingkatkan karena keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan cara mewakili, mengawal, meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran perempuan tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum.

Partisipasi perempuan dalam hal memilih pemimpin daerah sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketersediaan sumber daya memang relatif lebih rendah bagi perempuan, misalnya sumber daya waktu dan ekonomi. Akibat peran gender yang sudah ditentukan, seperti misalnya kecenderungan perempuan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengasuh anak dan urusan rumah tangga, sering kali membuat perempuan hanya memiliki sangat sedikit waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mendaftarkan

diri sebagai pemilih dan memberikan suara sering kali membutuhkan waktu lama untuk mengantre atau menempuh jarak yang jauh sehingga tidak cocok dengan tanggung jawab perempuan sebagaimana digariskan masyarakat. Rintangan tersebut akan semakin berat bagi perempuan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan perempuan kelompok minoritas yang mungkin tinggal jauh dari tempat pemungutan suara (IFES & NDI dalam Bibler, 2014: 7).

Selain itu, angka kemiskinan dan kurangnya kendali terhadap sumber daya ekonomi membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak sebagai pemilih, kandidat, juru kampanye partai, petugas pemilu, ataupun pengawas pemilu. Kendali terbatas terhadap aset ekonomi juga membatasi kemampuan perempuan untuk mencalonkan diri karena dalam banyak kasus mereka memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat digunakan untuk kampanye jika dibandingkan laki-laki (Bibler, 2014: 8).

Peran gender perempuan dan laki-laki lebih jauh dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama yang sering membatasi kebebasan perempuan atau mematahkan semangat perempuan untuk menggunakan hak pilih. Beberapa tradisi budaya dapat mengakibatkan tingkat pendidikan, melek huruf, dan pengetahuan yang lebih rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran sipil dan politik. Budaya juga dapat mempengaruhi perempuan untuk mencari posisi sebagai pemimpin serta dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan diri, keterlibatan politik, dan ketegasan perempuan. Akhirnya, sifat kompetitif proses politik sering kali dipandang sebagai permainan tanpa hasil (*zero sum game*), dan dapat membatasi dukungan publik

untuk perempuan yang ingin mencalonkan diri atau berpartisipasi di jabatan publik. Rintangan-rintangan tersebut diperparah dengan kekhawatiran keamanan spesifik-gender. Kurangnya staf keamanan berjenis kelamin perempuan di TPS, rute perjalanan dari satu titik ke titik yang lain sering berbahaya, dan minimnya infrastruktur mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam memberikan suara maupun dalam melakukan sosialisasi dan kampanye politik. Menyelesaikan beragam rintangan yang saling terkait ini membutuhkan pendekatan terpadu di seluruh bagian siklus pemilu (Bibler, 2014: 9).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat, termasuk perempuan, dalam pemilihan umum sangat diperlukan. Akan tetapi, partisipasi politik masyarakat Indonesia, khususnya pada pemilihan umum masih terlihat rendah. Beberapa daerah di Indonesia bahkan tidak mencapai target yang diharapkan. Seperti berita yang disiarkan laman Bangkapos, KPU Kabupaten Bangka menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur Bangka Belitung 2017 masih rendah, yakni baru mencapai 58%, dengan pemilih perempuan sebesar 61%. Pada sosialisasi peran perempuan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2018, KPU menargetkan angka partisipasi sebesar 77%. Berdasarkan fakta ini, partisipasi masyarakat Kabupaten Bangka dalam pesta demokrasi masih rendah dan belum memenuhi target. Begitu pula partisipasi perempuan yang tidak sesuai dengan angka yang ditargetkan pihak penyelenggara pemilihan.

Bagaimana dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2018? Ada tiga pasang

kandidat yang dinyatakan lolos, yakni Ir. H. Tarmizi H. Saat, M.M. dan Amri Cahyadi, S.T.; Mulkan, S.H., M.H. dan Syahbudin, S.I.P.; Dr. Ir. H. KMS. Daniel, M.M. dan Fadillah Sabri, S.T., M.Eng.

Adapun berikut ini data jumlah pengguna hak pilih yang ada di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka:

Tabel 1
Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Pilbup Tahun 2018

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bukit Betung	1.631	1.849	3.480
2	Jelitik	772	849	1.621
3	Kenanga	1.061	1.109	2.170
4	Kudai	1.068	1.106	2.174
5	Lubuk Kelik	529	477	1.006
6	Matras	851	927	1.778
7	Parit Padang	1.832	2.057	3.889
8	Rebo	848	869	1.717
9	Sinar Baru	562	624	1.186
10	Sinjay Jelutung	1.114	1.255	2.369
11	Srimenanti	2.595	2.951	5.546
12	Sungailiat	3.446	4.150	7.596
13	Surya Timur	475	735	1.210

(Sumber: KPUD Kabupaten Bangka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui jumlah pengguna hak pilih perempuan pada pilbup 2018 tertinggi adalah di Kelurahan Sungailiat sebanyak 4.150 orang, lalu kedua adalah Kelurahan Sri Menanti sebanyak 2.951 orang, disusul kemudian Kelurahan Parit Padang sebanyak 2.057 orang.

Lalu berapa angka keseluruhan perempuan pemilik suara dalam Pilbup 2018? Data pemilih

perempuan, khususnya di tiga kelurahan di atas, sebagaimana diperoleh dari KPU Daerah Kabupaten Bangka, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Bupati Tahun 2018

No.	Kelurahan	Jumlah pengguna hak pilih	Jumlah yang tidak memilih	Jumlah Pemilih Perempuan
1	Sungailiat	4.150 orang	2.202 orang	6.352 orang
2	Sri Menanti	2.951 orang	1.223 orang	4.174 orang
3	Parit Padang	2.057 orang	957 orang	3.014 orang

(Sumber: KPUD Kab. Bangka Tahun 2018)

Berdasarkan tabel di atas, ketiga kelurahan sebenarnya memiliki jumlah pengguna hak pilih perempuan cukup tinggi. Dalam persentase, perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 29,3% di Kelurahan Sri Menanti, 34,7% di Sungailiat, dan 31,8% di Parit Padang. Walaupun Kelurahan Sri Menanti paling rendah dalam persentase perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya (dibandingkan Sungailiat dan Parit Padang), tetap saja capaian ini tidak memenuhi target dalam penggunaan hak pilih oleh perempuan, yakni di bawah target partisipasi KPUD Bangka sebesar 77%.

Selain data tersebut, penulis juga sempat melakukan wawancara kepada beberapa perempuan yang terdata di Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Sri Menanti tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Berikut ini diungkapkan oleh Ibu Yuni di Sri Menanti:

“Saya tidak mau memilih karena bagi saya semuanya janji-janji palsu, harga sahang murah, karet murah jadi sia-sia jika saya

menggunakan hak pilih, lebih baik saya golput.” (Wawancara, 22 Juli 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lia warga Air Centeng:

“Menurut saya tidak ada pilihan yang cocok di hati, selain itu suara saya juga tidak mempengaruhi, nanti juga siapa pun yang menang kita tetap begini saja nasibnya sebagai orang kecil.” (Wawancara, 22 Juli 2019)

Pernyataan dua narasumber tersebut menggambarkan sebab-sebab yang mendorong mereka tidak menggunakan hak pilih.

Belum tingginya kesadaran perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2018 (sebagaimana data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Bangka) memberikan suatu gambaran tentang pentingnya perhatian terhadap tingkat partisipasi perempuan. Tanpa adanya perhatian, dan kondisi serupa terus-menerus terjadi, maka dikhawatirkan akan berakibat pada tingkat keterwakilan kepentingan perempuan di Bangka pada kemudian hari.

Masalah partisipasi ini tentunya dipengaruhi faktor-faktor tertentu yang dapat dijabarkan lebih detail. Hal inilah yang pada akhirnya yang menjadi latar belakang penulis untuk menjelaskan rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Penulis mengambil judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat pada Tahun 2018.”

LANDASAN TEORI

Pengertian Partisipasi

Made Pidarta (dalam Astuti, 2009: 31) menjelaskan tentang partisipasi, yaitu:

“Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.”

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi tujuh tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

- 1) Partisipasi pasif/manipulatif: masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi dengan cara memberikan informasi: masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3) Partisipasi melalui konsultasi: masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

- 4) Partisipasi untuk insentif materiil: masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
- 5) Partisipasi fungsional: masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator) hingga pada saatnya mampu mandiri.
- 6) Partisipasi interaktif: masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
- 7) *Self mobilization*: masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas dipengaruhi berbagai faktor. Ahli politik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik melalui berbagai pendekatan.

Dua pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sosial dan psikologi pemilih. Pendekatan sosial menekankan kondisi sosial, sedangkan pendekatan psikologi pemilih menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusannya.

Teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori Ramlan Surbakti dan Khoirudin. Berikut ini penjelasan tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Faktor latar belakang sosial-ekonomi

Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012: 195) menyatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga aspek ini didukung oleh Damsar (dalam Efriza, 2012: 195-197) yang melihat faktor sosial-ekonomi dapat diukur dari beberapa indikator, seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan. Faktor latar belakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor sosial-ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Status sosial, diukur melalui status sosial pemilih yang mengacu pada pendapatan, pekerjaan, dan jabatan.
- b. Pendidikan, diukur melalui tingkat pendidikan formal yang dimiliki pemilih.

2. Faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik
Khoirudin (dalam Efriza, 2012: 540) mengungkapkan bahwa fenomena semakin meningkatnya angka pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau golput dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:

“Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai, yang kemudian berakibat terhadap perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan. Padahal, tanpa adanya legitimasi dari warga negara, sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada.”

Partisipasi Perempuan Politik dan Pemerintahan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan terkait partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan terbilang masih rendah. Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki dan pola pikir patriarkis yang menancap secara mendalam di benak para pemimpin partai politik di Indonesia merupakan salah satu faktor utama penyebab perempuan masuk ke ranah politik sekaligus mempengaruhi agenda politis partai-partai politik.

Sistem politik secara demokratis adalah sistem politik dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, dan salah satu tolok ukurnya adalah suara rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, bukan melalui perwakilan. Dengan demikian, sudah waktunya kapasitas perempuan sebagai subjek politik diperluas lagi, bukan semata-mata sebagai objek politik.

METODOLOGI

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2005: 5). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, segala proses berlangsung dalam latar belakang yang wajar atau ilmiah dan berbentuk siklus dengan penelitian sebagai instrumen utamanya (Sutopo, 2002: 111).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi partisipasi pasif, dan studi perpustakaan. Adapun proses analisis data meliputi tahapan: (1) *data reduction* (reduksi data); (2) *data display* (penyajian data); (3) *conclusion drawing/verification* (menarik

kesimpulan atau verifikasi).

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi ataupun gambaran tentang partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yaitu:

- 1) Penyelenggara pemilu, yaitu komisioner KPUD;
- 2) Lurah Sri Menanti Kecamatan Sungailiat;
- 3) Pengurus perempuan di partai-partai politik;
- 4) Masyarakat perempuan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih;
- 5) Masyarakat perempuan pemilih yang menggunakan hak pilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka tahun 2018, ada tiga pasang kandidat yang dinyatakan lolos, yakni Ir. H. Tarmizi H. Saat, M.M. dan Amri Cahyadi, S.T.; Mulkan, S.H., M.H. dan Syahbudin, S.I.P.; Dr. Ir. H. KMS. Daniel, M.M. dan Fadillah Sabri, S.T., M.Eng.

Data awal yang penulis himpun berasal dari KUPD Kabupaten Bangka. Dari data ini diketahui bahwa total jumlah pengguna hak pilih perempuan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat pada Pemilihan Bupati tahun 2018 adalah sebanyak 2.951 orang (70,7%). Adapun perempuan yang memiliki hak

pilih tapi tidak menggunakannya adalah sebanyak 1.223 orang (29,3%). Angka ini tentunya menggambarkan masih belum tercapainya target partisipasi perempuan dalam menggunakan hak politik mereka, yakni dilihat dari target partisipasi KPUD Bangka sebesar 77%. Dari hasil data wawancara yang telah dianalisis, terdapat berbagai macam alasan dan jawaban dari informan yang kemudian mewakili gambaran pengalaman mereka.

Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012: 195) menyatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Faktor latar belakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih.

Alasan penggunaan faktor yang pertama berdasar pada pendapat Frank Lindefold (dalam Efriza, 2012: 197) yang menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai kepuasan finansial ternyata terlibat dalam kehidupan politik. Alasan penggunaan faktor yang kedua didasarkan atas pemahaman bahwa fungsi pendidikan sebagai sarana memberikan dan membentuk tahapan-tahapan kecerdasan politik. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran atas hak dan kewajiban dirinya sebagai warga negara.

Adapun indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor sosial-ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Status sosial, diukur melalui:

- Pendapatan pemilih perempuan;
- Pekerjaan yang dimiliki oleh pemilih perempuan;
- Jabatan yang dimiliki pemilih perempuan dalam sebuah organisasi masyarakat atau institusi;

2. Pendidikan, diukur melalui tingkat pendidikan formal yang dimiliki pemilih perempuan.

Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa Status Sosial

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, termasuk perempuan pemilih. Seperti dikatakan Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012: 195), tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Faktor latar belakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih.

Berdasarkan identifikasi masalah, jika dikaitkan dengan teori di atas, maka faktor latar belakang sosial-ekonomi berupa status sosial para informan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan pemilih perempuan.

Hal ini berdasarkan faktor pendapatan pemilih perempuan dan hasil temuan yang didapat dari para informan. Berdasarkan data yang didapat, penghasilan bisa saja mempengaruhi partisipasi perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam memilih pada Pilbup 2018. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kesejahteraan hidup mereka.

Jumlah ibu rumah tangga adalah sebanyak 43,75%. Di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, rata-rata penghasilan perempuan masih dari mengikuti suami karena berstatus rumah tangga. Hal ini bisa menjadi gambaran bahwa perempuan yang tidak bekerja akan mengikuti suami, dan berbagi dengan anggota keluarga lain. Dari sisi ekonomi, perempuan yang tidak bekerja ini secara otomatis tidak dapat menopang

perekonomian keluarga dibandingkan perempuan yang bekerja. Alhasil, dengan alasan mencari (tambahan) penghasilan inilah mereka pun lebih memilih meluangkan waktu demi urusan pemasukan keluarga dibandingkan berpartisipasi dalam Pilbup 2018.

2. Pekerjaan yang dimiliki oleh pemilih perempuan.

Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan (Angell dalam Firmansyah, 2009: 12).

Jumlah angkatan kerja usia 18-56 tahun di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tahun 2018 sebanyak 3.972 orang. Angka ini gabungan antara laki-laki dan perempuan. Adapun jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga sebanyak 1.738 orang atau sebesar 43,75%. Angka-angka ini memberikan gambaran tingkat penghasilan perempuan yang dianggap tidak bekerja sehingga mengikuti suami dan berbagi dengan anggota keluarga lain. Dari sisi ekonomi, mereka yang tidak bekerja tersebut secara otomatis tidak dapat membantu menopang perekonomian keluarga dibandingkan perempuan yang bekerja.

Untuk perempuan yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga, sebanyak 37% menjadi karyawan swasta, 24% menjadi PNS/Polri, dan sebanyak 10% merupakan honorer dan wiraswasta. Berdasarkan tingkat pekerjaan, data ini menunjukkan bahwa perempuan berpotensi menjadi pemilih pada Pilbup 2018 mengingat jenis pekerjaannya yang cukup baik secara ekonomi. Di sisi yang lain, pernyataan-pernyataan yang disampaikan narasumber saat wawancara memang masih belum memperjelas apakah tinggi rendahnya penghasilan dan pekerjaan mempengaruhi partisipasi ataukah tidak. Namun, secara umum narasumber sepakat bahwa jeli memilih pemimpin harus dikedepankan karena akan berpengaruh bagi masa depan mereka, khususnya ekonomi.

3. Jabatan yang dimiliki pemilih perempuan dalam sebuah organisasi masyarakat atau institusi.

Pada saat Pilbup 2018 terdapat tiga pasangan kandidat yang memang tidak ada satu pun sosok perempuan. Timbul anggapan bahwa jika tidak ada keterwakilan perempuan dalam pemilihan politik, maka berakibat partisipasi pemilih perempuan juga menurun. Berbeda pada saat pemilihan legislatif, masih ada calon-calon dari kalangan perempuan sehingga memicu tingkat partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilih juga tinggi.

Berdasarkan data dalam Profil Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, ada 15 perempuan atau 0,3% yang menjadi pengurus aktif partai politik. Hal ini jelas tidak membuat suara perempuan terwakilkan. Di sisi yang lain, jawaban dari beberapa narasumber

menjelaskan bahwa jabatan yang dimiliki perempuan dalam organisasi atau institusi ikut mempengaruhi partisipasi dalam menggunakan hak.

Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa Pendidikan

Faktor sosial-ekonomi berupa pendidikan didasarkan atas pemahaman bahwa fungsi pendidikan merupakan sarana memberikan dan membentuk tahapan-tahapan kecerdasan politik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran terhadap hak-kewajiban dirinya sebagai warga negara.

Hasil analisis dari pembahasan hasil wawancara mengenai faktor latar belakang sosial-ekonomi berupa pendidikan, diperoleh temuan bahwa pendidikan dianggap menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Bangka pada Pilbup 2018.

Tingkat pendidikan formal pemilih perempuan yang memiliki potensi hak pilih pada Pilbup 2018 adalah dari tingkat SD hingga S-3. Lulusan SMA/ sederajat hingga S-3 merupakan jenjang pendidikan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai bahkan mapan. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 46% perempuan pemilih berlatar lulusan SMA/ sederajat ke atas, sebanyak 23% lulusan SD/ sederajat, dan 16% merupakan lulusan SMP/ sederajat. Gabungan lulusan pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat mencapai 39%. Secara hipotesis, bisa jadi ini salah satu faktor penyebab tingkat

kesadaran perempuan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam menyalurkan hak pilihnya belumlah dikatakan tinggi. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa Status Sosial.

Status sosial mempengaruhi partisipasi perempuan di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam memilih pada Pilbup 2018. Tiadanya keterwakilan perempuan dalam sebuah pilihan politik turut mengakibatkan menurunnya partisipasi pemilih perempuan. Di Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ada 15 orang atau hanya sekitar 0,3% saja yang menjadi bagian perempuan aktif dalam pengurus partai politik. Hal ini jelas tidak membuat suara perempuan terwakilkan.

2. Faktor Latar Belakang Sosial-Ekonomi Berupa Pendidikan.

Tingkat pendidikan formal pemilih perempuan yang memiliki potensi hak pilih pada Pilbup 2018 adalah dari tingkat SD hingga S-3. Lulusan SMA/ sederajat hingga S-3 merupakan jenjang pendidikan yang dianggap memiliki pengetahuan yang

memadai bahkan mapan. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 46% perempuan pemilih berlatar lulusan SMA/ sederajat ke atas, sebanyak 23% lulusan SD/ sederajat, dan 16% merupakan lulusan SMP/ sederajat. Gabungan lulusan pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat mencapai 39%. Bisa jadi hal ini salah satu faktor penyebab belum tingginya tingkat kesadaran perempuan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dalam menyalurkan hak pilih. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih. Perempuan berpendidikan rendah, terlebih lagi sudah berusia lanjut, biasanya enggan memberikan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan rekomendasi kepada pihak Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih perempuan yang memiliki pendidikan formal di bawah SMA, tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
3. Mengintensifkan gerakan sosialisasi bagi pemilih perempuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran politik perempuan dalam partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Astuti, Siti Irene. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi*. Yogyakarta: UNY
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bari, Farzana. (2010). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP). Diakses dari <https://www.batukarinfo.com/system/files/Partisipasi%20Perempuan%20dalam%20Politik%20dan%20Pemerintah.pdf>
- Bibler, Sarah, Mohan, Vasu, dan Ryan, Katie. (2014). *Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: International Foundation for Electoral Systems
- Daulay, Harmona. (2007). *Perempuan dalam Kemelut Gender*. Medan: USU Press
- Efriza. (2012). *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Firmansyah, Saca. (2009). "Partisipasi Masyarakat." Diakses dari <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
- Hasan, Iqbal. (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Holil, Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial
- Jalal, Fasli. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka. Arsip Keputusan Tahun 2018.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset*. Jakarta: Kencana
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurhayati. (2017). "Partisipasi Politik Perempuan Kunci Utama Keberhasilan Pilkada 2018." Diakses dari <https://bangka.tribunnews.com/2017/12/23/partisipasi-politik-perempuan-kunci-utama-keberhasilan-pilkada-2018>
- Ridjal, Fauzie, dkk. (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Rosady, Ruslan. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparno, Indriyati, dkk. (2005). *Masih dalam Posisi Pinggiran; Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Surakarta*. Solo: Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM)
- Supranto, J. (1998). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YPKM
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

